IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 04 PENGADANG

Oleh:
ERIK FORTANATUS ASBANDI
NIM. E01109002

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email: ericcravas@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu standar pendidikan pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung dalam proses belajar mengajar.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang belum efektif. Teori yang digunakan adalah teoriimplementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel Menurut EDWARD (Subarsono: 2005)yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor utama kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang adalah faktor sumberdaya yaitu tenaga pendidik yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam melaksanakan kebijakan pengajaran di sekolah Dasar Negeri 04 Pengadang, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bahwa masih banyaknya Guru atau tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana, dan hanya 2 orang guru yang bersertifikat dan ada 5 orang belum bersertifikat, sehingga proses belajar mengajar kurang efektif dan kurang maksimal memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang.Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan Dinas pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada kepala sekolah, guru maupun siswa, sehingga pelaksanaaan program-program yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Kata-kata kunci: . Implementasi PP No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, SDN. No 04 Pangadang

Abstract

Problems in this study that education standards educators who do not meet the standards of educational qualifications that have been set by the government,and the lack of facilities and infrastructure to support the learning process. this paper aims to find and identify the factors that led to the implementation of Government Regulation No. 19 of 2005 at a public elementary school number 04 pengadang not efective .teori has been used is the theory of policy implementation is influenced by four variables according EDWARD (subarsono: 2005) is no four factors that affect a variable policy implementation is communication, resources, disposition and bureaucratic structure This study is included in a descriptive study with qualitative analysis. results of research in the field showed that the implementation of the Government Regulation No. 19 of 2005 on the national standard of education in the implementation have not been fully optimized. The main factor failures in policy implementation of government regulation number 19 of 2005 at a public elementary school number 04 pengadang is a factor of resources that educators tdak inadequate, adequate, or incompetent in their field. in implementing the policy of teaching in public elementary schools 04 barrier is a standard, educators and education personnel that there are many teachers and education personnel who do not meet the minimum

education qualification of Diploma (D-IV) or a scholar, and only two teachers certified and there are five people who have not been certified, so the learning process is less effective, and less than the maximum meet the standards stipulated in Government Regulation No. 19 of 2005 on the national standard of education in public elementary schools number 04 pengadang.recomended in research this is expected education office or the parties concerned to provide direction on government Regulation No. 19 of 2005 on the national standard of education to the principal, teachers and students, so that the implementation of programs related to national education standards can run we

Keywords: Regulation PP No. 19 Tahun 2005 ,Education Standards,SDN. No 04 Pangadan

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Bagi setiap orang tua, masyarakat, dan bangsa pemenuhan akan pendidikan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan bagianutama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan suatu bangsa.

Pendidikan menjadi sesuatu yang mahal dan sulit dinikmati,terutama oleh masyarakat kelas bawah. Hal itu dikarena kan mahalnya biaya dan kurang perhatian pemerintah terkait terhadap masalah pendidikan. Contohnya di wilayah perbatasan langsung dengan Negara tetangga kita Malaysia.Tepatnya di kecamatan Entikong dan kecamatan Sekayam pendidikan nya masih sangat rendah dikarenakan kurang maksimal nya perhatian Pemerintah terhadap warga di wilayah perbatasan.

Bandingkan bila kita melihat fakta di Negara Malaysia, pendidikan sangat dibekali dengan fasilitas sarana dan prasarana yang mumpuni berbeda sekali dengan Negara kita, walaupun sekarang pemerintah mulai giat mempermasalahkan segala masalah di perbatasan dengan Malaysia.terutama pendidikan banyak anak-anak putus sekolah dengan berbagai maca alasan semisalnya masalah ekonomi.

Kurangnya sarana prasarana serta guru yang ditempatkan yang terpencil di perbatasan sangat jarang datang untuk mengajar, anak-anak di perbatasan cenderung mengenyam pendidikan sekolah dasar, setelah itu mereka bekerja membantu berbagai kegiatan orang tua.walaupun tidak

ERIK FORTANATUS ASBANDI, NIM. E01109002
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

semuanya seperti hal ini ironis sekali jika kita bandingkan dengan Negara tetangga Malaysia, Serta para guru juga banyak sekali yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang ditentukan oleh pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang belum lagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang dikuasai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya (Nugroho R, 2003:1-7).Sedangkan menurut Easton (dalam Islamy, 1992:19), bahwa kebijakan publik hanya pemerintah yang secara syah berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III (dalamSubarsono : 2005)**.**

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasialan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting

ERIK FORTANATUS ASBANDI, NIM. E01109002
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

untuk implementasi kebijakan agar efiktif.Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

1) Staf (*staff*), kuantitas dan kualitas pelaksana yang memadai merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan.
2) Informasi (*information*) yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan
3) Kewenangan (*authority*) tugas dan tanggung jawab.
4) Fasilitas (*facilities*) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor.apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

1) Penempatan pegawai (*staffing the bureaucracy*), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.
2) Insentif (*incentives*), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Daribeberapateori yang dijelaskandiatasmaka peneliti mengunakan Teori dari Edward III, peneliti berpendapat

bahwa teori Edward III dapat mewakili dan menjawab dari identifikasi permasalahan dan peneliti menganggap ada yang salah dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi

Bagan Kerangka Pikir

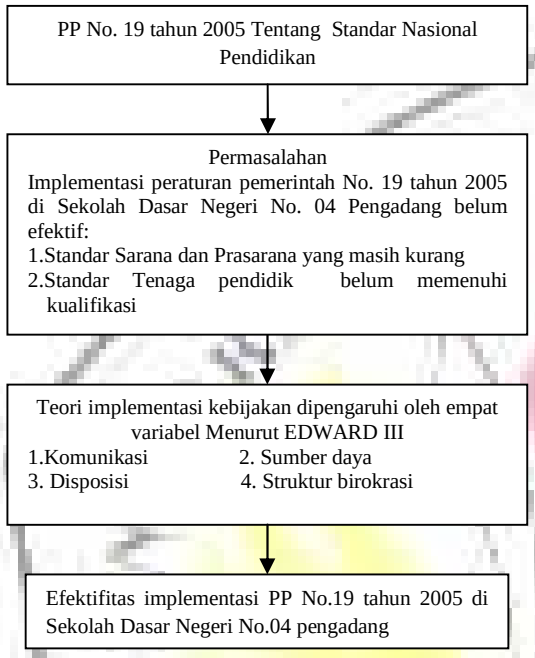

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: "penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti". Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat.Subjek penelitian.dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Kepala sekolah SDN No. 04
2) Guru SDN No. 04
3) Komite Sekolah

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1) Meringkas *(reduksi)*, tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2) Memaparkan *(display)*, Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

ERIK FORTANATUS ASBANDI, NIM. E01109002
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3) Penyimpulan *(verifikasi)*, data-data yang diperolah yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikanyaitu Standar sarana dan prasarana serta Standar pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 04.Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal, yang disebabkan oleh beberapa kendala yang utamanya Sumber Daya Manusia yang masih kurang dalam hal tenaga pendidik.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang

   - **Faktor Komunikasi**

     Komunikasi memberikan kontribusi besar pada proses pelaksanaan PP No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang , yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada kepala sekolah, guru dan siswa dalam proses belajar mengajar yang efektif dalam di sekolah. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan sekolah yang kondusif, karena tanpa komunikasi informasi tidak dapat di sampaikan dengan baik.

   - **Sumber Daya**

     Sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan.Pengembangan sumber daya kebijakan di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang, pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia.Di masa sekarang ini persaingan bebas begitu tajam dan setiap individu dituntut dalam bersaing dengan individu lainnya.Maka dari itu setiap orang perlu membekali diri mereka dengan pendidikan yang bagus dan bermutu agar tidak kalah saing dengan yang lainnya.Agar pendidikan di Indonesia ini berkembang dengan bagus dan bermutu, maka sumber daya pendidikan pun perlu dikelola dan

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

- **Disposi/Sikap**

  Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan implementasi PP No. 19 tahun 2005 dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam struktur birokrasi. Sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih pelaksanaan tugas.

- **Struktur Birokrasi**

  Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya.Guru Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu memperhatikan posisi jabatan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan serta menciptakan suana pembelajaran yang kondusif.

E. PENUTUP

a) KESIMPULAN

Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang Yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi memberikan kontribusi besar pada proses pelaksanaan PP No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang , yaitu memberikan dasar atau fondasi kepada kepala sekolah, guru dan siswa dalam proses belajar mengajar yang efektif dalam di sekolah. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan sekolah yang kondusif, karena tanpa komunikasi informasi tidak dapat di sampaikan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumberdaya utama dalam implementasi peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 di Sekolah Dasar Negeri No. 04

pengadang adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena tenaga pendidik yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya, dalam melaksanakan kebijakan pengajaran di sekolah Dasar Negeri 04 Pengadang, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memenuhi kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau sarjana, dan hanya 2 orang guru yang bersertifikat dan ada 5 orang belum bersertifikat, Guru yang memenuhi kualifikasi akademik Cuma 2 orang dan tidak memenuhi kualifikasi akademik 5 orang yaitu Rata-rata guru di Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang guru belum memenuhi kualifikasi akademik yang telah ditentukan, sehingga proses belajar mengajar kurang efektif dan kurang maksimal memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri No. 04 Pengadang.Saran yang dapat penulis berikan

3. Disposisi/Sikap

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan implementasi PP No. 19 tahun 2005 dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam struktur birokrasi. Sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Guru Sekolah Dasar Negeri No. 04 pengadang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu memperhatikan posisi jabatan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan serta menciptakan suana pembelajaran yang kondusif.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan yangpeneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan, Saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah dalam hal Dinas pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kepada kepala sekolah, guru maupun siswa, sehingga Pelaksanaaan program-program yang berkaitan dengan

Standar Nasional Pendidikan dapat berjalan dengan baik.

2. Dalampelaksanaan Program inidiharapkan pemerintah setempat untuk mengarahkan, membimbing serta mengawasi penyelenggaraan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

F. REPERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UI Press.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi,Hadari.2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno,Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Media Presindo. Yogyakarta

2. Sumber-sumber perundang - undangan

PP No. 19 th. 2005 tentang StandarNasional pendidikan

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

ERIK FORTANATUS ASBANDI, NIM. E01109002
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Erik Fortanatus Asbandi
NIM / Periode lulus	: E01109002/IV
Tanggal Lulus	: 6 April 2015
Fakultas/ Jurusan	: ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail addres/ HP	: ericcravas@yahoo.co.id / 089663606607

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 04 PENGADANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui 7-12-2015
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 19 November 2015

Erik Fortanatus Asbandi
NIM. E01109002

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)